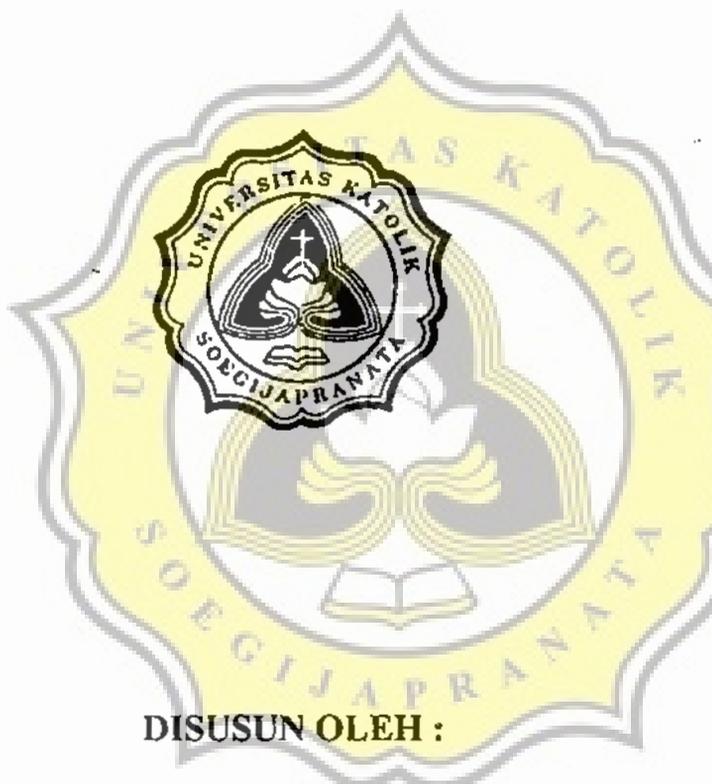


**KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DALAM PENATAAN PERMUKIMAN DI KAWASAN
BANTARAN SUNGAI**



SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Progran Studi Sarjana Strata Satu Ilmu Hukum



DISUSUN OLEH :

**NAMA : BETANANTA C S
NIM : 97.20.1422
NIRM : 97.6.111.01000.50027**

	PERPUSTAKAAN	
	No. INV.	390 / 64 / c-1
	No. PEN.	
PARAP.		TGL. 28-08-02

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2002**

**KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM
PENATAAN PERMUKIMAN DI KAWASAN BANTARAN SUNGAI**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas- tugas dan memenuhi
syarat- syarat guna menyelesaikan Program Studi
Sarjana Strata I Ilmu Hukum



Dosen Pembimbing I

(Endang Wahyati, SH, MH)

Dosen Pembimbing II

(Yovita Indrayati, SH, M. Hum)

**Fakultas Hukum
Universitas Katolik Soegijapranata
Semarang
2002**

HALAMAN PENGESAHAN

Dipertahankan dan diterima di depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I Program Studi Ilmu Hukum.

Semarang, 18 Juli 2002

Fakultas Hukum

Universitas Katolik Soegijapranata

Semarang

Dekan

(Y. Budi Sarwo, SH. MH)

Ketua Dewan Penguji

Sekretaris Dewan Penguji

(Y. Budi Sarwo, SH. MH)

(Petrus Soerjowinoto, SH. M. Hum)

Dosen Penguji :

1. Yovita Indrayati, SH, M.Hum

()

2. Endang Wahyati, SH. MH

()

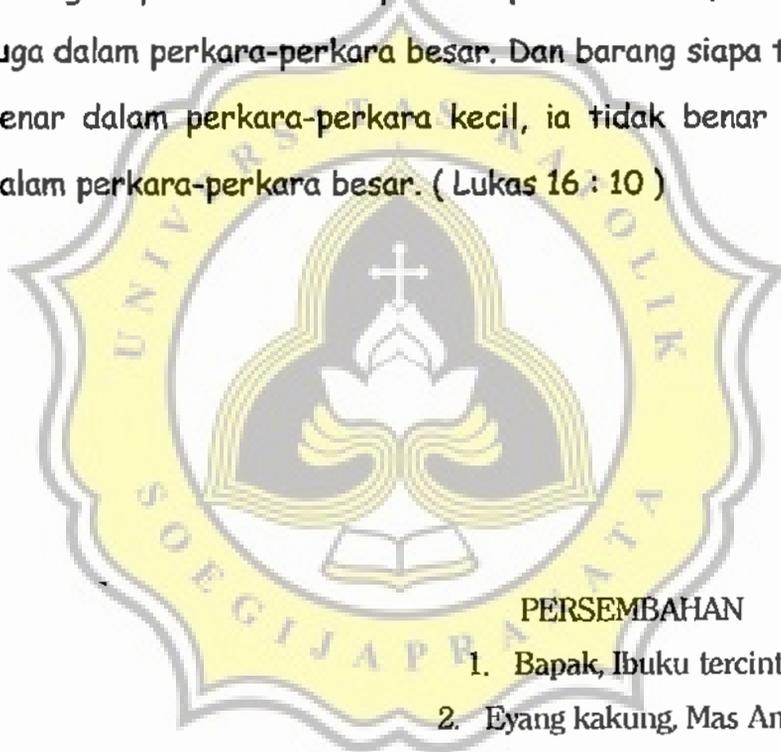
3. Hotmauli Sidabalok, S.H, C.N, M Hum

()

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

1. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. (Amsal 9 : 10)
2. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. (Lukas 16 : 10)



PERSEMBAHAN

1. Bapak, Ibuku tercinta
2. Eyang kakung, Mas Andri, mbak Nina, & Putri
3. Tante-tanteku
4. Semua yang telah memberikan dukungan, doa, semangat serta dorongan pada penulis
5. Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk meraih gelar kesarjanaan strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Dalam skripsi ini penulis mengambil judul “KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM PENATAAN PERMUKIMAN DI KAWASAN BANTARAN SUNGAI”. Pengambilan judul tersebut dikarenakan adanya kontroversi antara Peraturan mengenai perlindungan terhadap sungai dan bantaran sungai dan kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam mengatasi persoalan permukiman di kawasan bantaran sungai, Penulis berharap skripsi ini dapat memberi masukan bagi Pemerintah Kota Semarang dalam mengatasi persoalan permukiman di kawasan bantaran sungai, dan bagi masyarakat dalam partisipasinya melestarikan fungsi lingkungan hidup, yang dalam hal ini melestarikan fungsi sungai. Penulis mohon maaf apabila dalam skripsi ini terdapat banyak kekurangan, baik segi materi maupun redaksional.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bruder Dr. Martinus Handoko, FIC selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

2. Bapak Y. Budi Sarwo, SH. MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Ibu Endang Wahyati, SH. MH, selaku Dosen Pembimbing I dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Yovita Indrayati, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Resti Nurhayati, SH. M.Hum, selaku Dosen Wali.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf pengajaran pada Fakultas Hukum Unika Soegijapranata Semarang.
7. Sahabat-sahabatku Ita, Selvi, Ari, Dian, Asti, Dina, Rini, Wiwik, Nara, Yanti dan Ika yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan mendukung selesainya penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan kalangan akademis pada khususnya.

Semarang, Juli 2002

Penulis,

(BETANANTA C S)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAKSI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Sungai dan Perlindungan Sungai.....	10
B. Bantaran Sungai dan Perlindungan Bantaran Sungai.....	14
C. Kebijakan dan Kebijakan Pemerintah dalam Penataan Permukiman.....	17
D. Permukiman, Perumahan, dan Pengaturan Permukiman.....	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
A. Metode Pendekatan.....	26

B. Spesifikasi Penelitian.....	27
C. Obyek dan Lokasi Penelitian.....	27
D. Metode Pengumpulan Data.....	29
E. Metode Penyajian Data.....	31
F. Metode Analisa Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Hasil Penelitian.....	33
1. Gambaran Umum mengenai Permukiman di Kawasan Bantaran Sungai.....	33
a. Sejarah Pertumbuhan Kota Semarang.....	33
b. Pertumbuhan Permukiman di Kawasan Bantaran Sungai.....	34
c. Permukiman di Kawasan Bantaran Sungai (kali) Semarang.....	37
d. Tabel Hasil Penelitian pada Masyarakat Bantaran Sungai.....	39
2. Gambaran tentang Instansi-Instansi yang Terkait dalam Penataan permukiman di Kawasan Bantaran Sungai.....	42
B. Pembahasan.....	54
1. Pengaturan Hukum Penataan Permukiman di kawasan Bantaran Sungai di Kota Semarang.....	54
a. Dasar Hukum.....	54

b. Bentuk Pengaturan.....	59
c. Tujuan Pengaturan.....	67
2. Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam Penataan Permukiman di Kawasan Bantaran Sungai.....	70
a. Instansi yang terkait dalam Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam Penataan Permukiman di Kawasan Bantaran Sungai.....	70
b. Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam Penataan permukiman di Kawasan Bantaran Sungai.....	72
3. Hambatan yang dialami oleh Pemerintah Kota Semarang dalam Penataan Permukiman di Kawasan Bantaran Sungai dan Cara Mengatasinya.....	83
a. Hambatan dari sisi Pemerintah.....	83
b. Hambatan dari sisi Masyarakat.....	84
BAB V PENUTUP.....	89
A. KESIMPULAN.....	89
B. SARAN.....	96
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

ABSTRAKSI

Latar belakang penulisan skripsi ini adalah terjadinya kontroversi antara peraturan yang mengatur mengenai perlindungan sungai dan bantaran sungai, dan kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam mengatasi persoalan Permukiman di kawasan bantaran sungai. Kontroversi tersebut terjadi karena adanya kepentingan masyarakat yang sulit diatasi dengan peraturan yang ada.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis yaitu metode pendekatan yang tidak hanya ditinjau dari kaidah-kaidah hukum saja, tetapi juga meninjau bagaimana pelaksanaannya dalam masyarakat, mengingat masalah yang diteliti adalah permasalahan keterkaitan antara faktor yuridis dan sosiologis. Obyek penelitian skripsi ini adalah kebijakan Pemerintah kota Semarang dalam penataan permukiman di kawasan bantaran sungai. Lokasi penelitian skripsi ini adalah permukiman di kawasan bantaran sungai. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dalam skripsi ini terdiri dari studi lapangan dan studi kepustakaan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian dan dilengkapi dengan tabulasi sederhana. Metode analisa data dilakukan dengan menyusun data secara lengkap, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif

Kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam penataan permukiman di kawasan bantaran sungai adalah membiarkan masyarakat untuk tetap tinggal di kawasan bantaran sungai, yang kemudian diikuti suatu penataan permukiman di kawasan bantaran sungai. Hal ini dapat diketahui dari tidak adanya tindakan Pemerintah Kota Semarang yang secara tegas melarang adanya permukiman di kawasan bantaran sungai, Pemerintah Kota Semarang menyediakan sarana-sarana umum untuk masyarakat yang bermukim di kawasan bantaran sungai, dan masyarakat yang bermukim di kawasan bantaran sungai wajib membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Kebijakan Pemerintah Kota Semarang tersebut dilakukan karena masyarakat menempati

kawasan tersebut secara turun-temurun, kawasan tersebut dihuni oleh masyarakat ekonomi menengah ke bawah, belum adanya dana untuk memindahkan dan menyediakan lahan baru untuk mereka, dan adanya teknologi untuk melindungi masyarakat dari bahaya banjir dan mengembalikan fungsi sungai seperti semula, dimana teknologi ini disebut dengan normalisasi sungai. Dengan adanya normalisasi sungai maka kini permukiman tersebut terletak diluar tanggul yang berarti tidak melanggar peraturan yang ada.

Dalam melaksanakan penataan permukiman di kawasan bantaran sungai, Pemerintah Kota Semarang menemui beberapa hambatan. Hambatan-hambatan tersebut terdiri dari hambatan dari sisi Pemerintah Kota Semarang yang antara lain adalah terjadinya tumpang tindih kewenangan karena kurangnya koordinasi dan Pemerintah Kota Semarang belum mampu mengadakan dana untuk memindahkan dan menyediakan lahan baru bagi masyarakat yang bermukim di kawasan bantaran sungai, dan hambatan dari sisi masyarakat yang antara lain adalah keadaan perekonomian yang lemah membuat masyarakat terpaksa bermukim di kawasan bantaran sungai dan minimnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan yang ada, sehingga mereka tidak merasa beresalah tinggal di kawasan bantaran sungai.

Menurut penulis persoalan permukiman di kawasan bantaran sungai sebaiknya diatasi dengan mempersiapkan kawasan baru untuk permukiman yang layak dan tidak melanggar hukum bagi masyarakat yang bermukim di kawasan bantaran sungai, dan membangun kawasan tersebut dengan fasilitas yang memadai. Selain itu, untuk mengembalikan fungsi sungai, sebaiknya Pemerintah Kota Semarang melakukan renaturalisasi sungai, yaitu mengembalikan bentuk sungai seperti aslinya, di mana bentuk asli sungai adalah berkelak-kelok tanpa dinding- dinding beton di sekitar sungai.